

Perempuan dan Kearifan Lokal dalam Bina Damai: Pengalaman La Rimpu (Sekolah Rintisan Perempuan untuk Perubahan) di Bima, Nusa Tenggara Barat

Abdul Wahid, Atun Wardatun

Universitas Islam Negeri Mataram

dipifanda@yahoo.com, atun_Wardatun@Uinmataram.ac.id.

ABSTRAK

The study considerably challenges several stereotypes regarding women as victims in conflicts and their condemnatory identity as sources of defamation and social instabilities. Regardless of numerous alternative perspectives concerning women and peace, critical investigations by creative measures utilizing local values to promote security and tranquillity while promoting women's roles in society are limited. This paper investigates the approaches and methods of la Rimpu (a women-initiated school for changes) in chronic conflicts of neighbouring villages in Bima, West Nusa Tenggara, and their beneficial impacts. By combining an auto-ethnographic method, intensive participatory observations, in-depth interviews with women with experiences in la Rimpu, and document analyses, this article argues that revitalizing and integrating local values to foster peace and prevent conflicts alternate a reasonable and effective strategy for two main reasons namely building women's confidence in advocating the issues and preventing refusal from the natives. Local values are considered as a crucial cultural capital strengthening their identity and social solidarity.

Keyword: *Local wisdom, peace building, cultural capital, women agencies, community leadership*

A. Pendahuluan

Pada tahun 2009, Bima, Nusa Tenggara Barat dilaporkan mencekam karena perang antarkampung, yakni Ngali *versus* Renda yang terjadi secara eskalatif (<https://www.liputan6.com/news/read/250131/bima-mencekam>). Nuansa konflik pasca kejadian ini tetap kental, baik secara laten maupun manifes. Di tempat lain di Bima, pada 2012, juga terjadi perkelahian antarkampung, yakni antara warga Desa Samili *versus* warga Desa Dadibou di Kecamatan Woha Kabupaten Bima, yang juga mencekam karena di samping terdapat korban jiwa akibat pembunuhan juga berlangsung pembakaran pemukiman warga oleh warga lain (<https://www.liputan6.com/news/read/461897/dua-kelompok-warga-di-desa-kalampa-bentrok>). Peristiwa ini menyisakan konflik laten di antara warga yang pernah bertikai. Pada tahun yang sama, 2012, terjadi juga perkelahian antarkampung, Desa Roi *versus* Desa Roka di Kecamatan Belo Kabupaten Bima (<https://kahaba.net/berita-bima/4705/warga-desa-roi-dan-roka-kembali-tegang.html>) dan di Kecamatan Wera Kabupaten Bima, pada tahun 2017 (Wora *versus* Nangawera) yang juga memakan korban (<http://www.metromini.info/2017/04/polisi-turunkan-personilnya-konflik.html>).

Penyelesaian konflik-konflik tersebut telah diupayakan baik oleh pemerintah maupun oleh inisiatif masyarakat setempat dengan pendekatan yang tipikal. Pemerintah cenderung menempuh upaya struktural, dengan melibatkan aparatur dan keamanan dengan paradigmanya sendiri. Sementara itu, inisiasi masyarakat lebih bersifat tradisional dengan mengandalkan peran kharisma kepemimpinan setempat yang cenderung patriakhal. Pelibatan aktor, agen, dan peran alternatif dengan jalan metodologi yang lain cenderung terkesampingkan, bahkan tidak terpikirkan. Masyarakat, di sisi lain, memiliki modalitas kultural berupa adanya sistem pengetahuan dan kelompok strategis. Potensi terakhir ini tampaknya tidak mendapat tempat

untuk berdaya guna bagi proses bina damai dalam masyarakat. Kaum perempuan, misalnya, dengan agensi, yang mereka punya, selama ini belum tereksplorasi dengan baik.

Kehadiran perempuan dan pelibatan kearifan lokal dalam praktik bina damai dapat dianggap sebagai alternatif dalam aspek resolusi konflik. Hal ini juga menggambarkan adanya variasi agensi dan modalitas dalam masyarakat. Melihat pengalaman keterlibatan Sekolah Rintisan Perempuan untuk Perubahan (La Rimpu) dalam praktik bina damai, kearifan lokal menjadi basis dan modal sosial yang sangat signifikan dan berdaya guna dan memiliki efikasi dalam upaya resolusi konflik. Pengamalan La Rimpu juga memberikan ruang bagi aktor lain dalam bina damai, yakni kelompok perempuan untuk memainkan agensi mereka, bukan saja sebagai pendukung melainkan juga sebagai aktor utama perdamaian.

Daya guna nilai dan kearifan lokal dalam manajemen konflik, terutama pencegahan dan bina damai sudah menjadi gagasan dan praktik yang meluas. Di antara lembaga maupun para sarjana yang mempromosikan gagasan itu antara lain: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) - 2019 yang melihat bahwa kearifan lokal di Indonesia efektif untuk langkah bina damai; Jati (2013) yang mengurai tentang kearifan *Pela Gandong* di Maluku; Astuti (2017) yang melihat metode *garduaction* sebagai prototipe bina damai di Yogyakarta; Fitriani (2018) yang membahas tentang kearifan *Dalian Na Tolu* dan *Rakut Sitelu* di Kabupaten Karo; Nasrullah (2018) yang mengupas tentang keterpaduan antara kearifan lokal dengan nilai agama dalam upaya resolusi konflik di Lombok Barat NTB; serta Wahid (2016) yang mempromosikan kearifan lokal *Dou Mbawa* di Bima NTB sebagai perangkat harmoni masyarakat multikultural.

Dalam gagasan dan praktik revitalisasi kearifan lokal untuk bina damai tersebut posisi perempuan sebagai subyek perdamaian belum terungkap secara jelas (Dewi, 2013; Yustisia, 2016; Ocktafiana, et.al: 2014). Posisi perempuan dalam konflik

memang lebih banyak dipandang sebagai korban, bahkan untuk banyak kasus, perempuan dilihat sebagai sumber pertikaian itu sendiri di dalam masyarakat.

Pandangan mengenai posisi perempuan dalam konflik dan bina damai cenderung terbantahkan oleh penelitian-penelitian mengenai perempuan dan perdamaian. Indriani (2018) melalui penelitian tesisnya, membuktikan bahwa kejadian konflik di Poso maupun di Jakarta Timur telah melibatkan perempuan sebagai agen perdamaian. Pelibatan mereka diawali dengan sekolah pendidikan perdamaian untuk perempuan. Hal ini juga terjadi di daerah-daerah lain, di mana perempuan menggunakan sumber daya atau modalitas sosial berupa kearifan lokal seperti yang terjadi di Maluku dengan *Pela Gandong*-nya (Pattiasina, et.al 2018). Di Aceh, Ismiati (2016) mengungkap bekerjanya aspek ini pada level komunitas maupun sosial politik, sementara di Yogyakarta terdapat proyeksi kerjasama perempuan dengan laki-laki (Rihartono, 2013).

Bukan hanya ada, bahkan keterlibatan perempuan dalam upaya bina damai menunjukkan corak yang beragam, terutama dalam aspek wahana dan strategi. Ada yang menggunakan organisasi sosial kemasyarakatan wadah mereka bernaung seperti Muslimat Nahdhatul Ulama sebagaimana ditemukan oleh Farida (2018) di Jawa Tengah. Perempuan juga terlibat dalam gerakan lintas iman untuk memastikan perdamaian antaragama benar-benar bisa diwujudkan seperti lewat gerakan "Srikandi Lintas Iman" di Yogyakarta (Wahyu, et.al 2019). Sayangnya, perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa perempuan malah terlibat aktif dalam gerakan radikalisme dan ekstrimisme yang bercorak kekerasan (Mulia, 2018).

Menghadapi fenomena penggunaan agensi perempuan dalam gerakan kekerasan tersebut maka sekolah perempuan perdamaian dan berbagai upaya kreatif yang mengarahkan dan mengakui eksistensi perempuan dalam upaya perdamaian mulai mendapat tempat. Pengembangan gagasan dan praktik

perempuan untuk perdamaian ini berlangsung dalam skala komunitas, regional, nasional, dan internasional. Dalam skala lokal di Nusa Tenggara Barat La Rimpu menunjukkan eksistensi dan kinerjanya dalam upaya bina damai melalui kerja-kerja kreatif, dan ini dapat dilihat sebagai praktik baik (*best practice*) di tingkat lokal yang bisa tanda bagi gerakan global. Tulisan ini akan melihat bagaimana praktik baik La Rimpu ini memberi signifikansi bagi bekerjanya perempuan sebagai agen perdamaian dan perubahan sosial.

Kajian Wardatun (2017) menunjukkan bahwa perempuan memiliki sumberdaya yang memungkinkan mereka berperan sebagai subjek bina damai, karena mereka memiliki agensi, suatu kapasitas bertindak. Contoh kapasitas itu terlihat dalam praktik pengumpulan donasi di kalangan masyarakat Renda dan Ngali di Kabupaten Bima, NTB ketika terjadi perkelahian antarkampung yang melibatkan masyarakat kedua desa itu. Dalam menjalankan peran itu, kaum perempuan bergerak dari rumah ke rumah untuk menggalang dana yang digunakan untuk menopang tugas polisi yang menjaga kampung pasca konflik sehingga pertikaian tidak kembali terjadi.

Agensi sebagai kekuatan untuk terlibat dan bertindak dalam bina damai ini berakar dari kearifan lokal yang termanifestasikan dalam praktik keseharian walaupun tanpa formulasi yang jelas dan resmi. Praktik-praktik negosiasi maupun rekonsiliasi itu berlangsung secara alamiah sehingga memungkinkan potensi dan peran perempuan teraktualisasikan dalam berbagai model. Selanjutnya, setelah La Rimpu mengoperasikan model sekolah komunitas di wilayah konflik itu, barulah dirumuskan suatu basis gerakan mereka dengan mengambil prinsip dan jargon-jargon yang memuat nilai-nilai kearifan lokal.

Pengalaman La Rimpu dilihat sebagai praktik baik (*best practice*) yang menunjukkan bahwa bina damai dan pelibatan perempuan merupakan strategi alternatif yang tidak saja efektif bagi pencegahan konflik secara natural, tetapi berpengaruh pada

posisi perempuan di ranah publik. Keterlibatan perempuan dalam La Rimpu di samping mengembangkan modal kultural yang dimiliki perempuan untuk memperkuat kapasitas dan identitas diri pribadi juga pada gilirannya terlibat dalam isu dan proses sosial dari praktik bina damai. Menariknya, keterlibatan perempuan dalam pendidikan dan proses sosial La Rimpu berbarengan dengan penerimaan masyarakat terhadap peran publik perempuan. Tanpa disadari isu kesetaraan gender diserap secara meluas dan lebih mendalam, karena penanaman kesadaran akan pentingnya peran publik dibangun dari nilai-nilai yang sebenarnya sudah lama dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Sementara itu, perjuangan untuk melawan kekerasan dan konflik juga semakin menunjukkan efektifitasnya karena pelibatan isu gender dan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi salah satu syarat dari keberhasilan upaya ini.

Artikel ini bertujuan menghadirkan narasi tentang keterlibatan perempuan di dalam praktik bina damai pada daerah konflik dengan basis kearifan lokal dan La Rimpu sebagai model gerakan. Narasi bersumber dari keterlibatan penulis secara intensif dalam proses La Rimpu. Pertanyaan terfokus pada bagaimana gerakan perempuan lokal bekerja dalam ekosistem dan pranata sosial-budaya menghasilkan “tanda” bagi adanya alternatif sumberdaya bina damai.

Secara metodologis, karena penulis juga menjadi bagian dari aktor di balik La Rimpu maka penulisan artikel ini menggunakan pendekatan autoetnografi, dengan menggambarkan secara mendalam pengalaman personal dan juga melakukan observasi terlibat untuk menangkak dan memaknai fenomena La Rimpu dari dalam (*from within*). Observasi partisipan dilakukan dalam setahun terakhir ini (selama 2021). Mengapa pengamatan intensif berlangsung selama 2021, karena tahun itu adalah tahun ketiga beroperasinya La Rimpu dan dilakukan evaluasi terutama tentang bagaimana pelaksanaan gagasan dan rencana strategi teraplikasi maupun termodifikasi di lapangan. Penelitian ini juga

menggunakan wawancara mendalam kepada beberapa pelaku strategis dan tokoh kunci dalam La Rimpu di masing-masing desa pendampingan dan memanfaatkan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh La Rimpu sebagai sumber data tertulis.

B. Pembahasan

1. Sejarah Pembentukan La Rimpu

La Rimpu - singkatan dari "Sekolah Rintisan Perempuan untuk Perubahan" - berdiri secara *de facto* pada tanggal 21 April 2018, bertepatan dengan Hari Kartini dan ditandai dengan kegiatan Persiapan Sekolah Perempuan untuk Perdamaian, di Bima, Nusa Tenggara Barat. Secara *de jure* menerima status kelembagaan sebagai yayasan dengan Akta Notaris Muhammad Ali, SH. M.Kn Nomor 16 Tanggal 11 Mei 2019 SK Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0006899.AH.01.04 Tahun 2019.

La Rimpu memiliki visi "Terwujudnya integrasi dan harmoni sosial oleh perempuan, bersama masyarakat, untuk perubahan." Visi tersebut dijabarkan dalam beberapa misi yaitu: 1) Melakukan kegiatan penguatan kapasitas perempuan agar bisa berperan aktif baik pada level keluarga, masyarakat, maupun negara; 2) melakukan kegiatan pengembangan masyarakat berbasis riset; 3) melakukan kampanye-kampanye perdamaian secara kreatif; 4) mengembangkan pola keterlibatan perempuan dalam mewujudkan kehidupan sosial yang setara, inklusif dan produktif; 5) melakukan advokasi, konseling, pendampingan dan bantuan hukum bagi perempuan dan untuk masyarakat rentan dan miskin; dan 6) terlibat dalam kegiatan kemanusiaan, pelestarian lingkungan, dan pengembangan seni budaya.

Dalam umurnya yang menginjak tahun keempat ini, La Rimpu melewati beberapa fase penting, sebagai berikut:

a. Sumber Inspirasi dan Periode Pemikiran

Pendiri La Rimpu adalah sepasang suami istri, Atun Wardatun dan Abdul Wahid. dosen dan pegiat literasi di wilayah Nusa Tenggara Barat. Sebagai pemikir-aktivis mereka memadukan antara teori dan praksis dalam pengembangan masyarakat. Ilmu tidak lain untuk berkhidmat bagi kehidupan, begitulah prinsip mereka. Diakui oleh Atun Wardatun, sang pendiri, motto "*Bringing Knowledge to Life*" dari Western Sydney University tempat ia menempuh pendidikan doktoral, begitu membentuk jiwa pengabdian akademiknya (wawancara Atun Wardatun, Juli 2020). Pada saat yang sama, Abdul Wahid, tandemnya, adalah seorang penganut ilmu sosial prefetik ala Kuntowijaya yang mengandaikan adanya intelektual yang terlibat dalam perubahan sosial. Baginya, seorang akademisi adalah sekaligus seorang perencana sosial (*social engineer*) yang memiliki lokus pengabdian dan pikiran-pikiran besar, sehingga motto "*Think Globally, Act Locally*" menjadi filosofi keterlibatan sosial di tingkat lokal (Wawancara Abdul Wahid, Juli 2020). Bukan kebetulan, dan atas dorongan filosofi pengetahuan dan keterlibatan di atas, pada periode 2014-2016 kedua pendiri melakukan penelitian lapangan (etnografi) Bima NTB, daerah kelahiran mereka sendiri. Hasil penelitian itu menjadi salah satu unsur pembentuk gagasan berdirinya La Rimpu dua tahun kemudian.

Wahid melakukan penelitian tentang masyarakat Muslim dan Kristen di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima mempertahankan tradisi untuk merajut harmoni (Wahid 2016, 2019). Sedangkan Wardatun meneliti agensi (kapasitas bertindak perempuan) dalam hubungannya dengan peran dalam keluarga (Wardatun, 2019) dan modernisasi di wilayah zona merah dalam peta konflik sosial di Desa Renda dan Desa Ngali di

Bima (Wardatun, 2017). Penelitian Wahid menemukan modalitas sosial untuk harmoni dalam praktik budaya dan kearifan lokal, sementara penelitian Wardatun mengungkap potensi perempuan bagi sumberdaya manusia atau agen dalam mengatasi konflik sosial.

Pada dasarnya penelitian-penelitian tersebut mengungkap adanya moral publik yang sangat kuat dalam bentuk solidaritas kolektif. Nilai ini sebenarnya menjadi ciri khas dan pranata kultural masyarakat Bima yang juga dikenal oleh daerah lain. Oleh karena itu masyarakat Bima termasuk kalangan perempuan bisa tampil menjadi penengah dalam konflik-konflik sosial atas dasar bekerjanya moral publik tersebut.

Keyakinan tentang kemampuan perempuan sebagai agen damai dan adanya moral publik sebagai basis gerakan sosio-kultur ini sia-sia jika tidak diterjemahkan menjadi tindakan sosial. Atas dasar itu, kedua peneliti-pendiri La Rimpu ini melakukan diseminasi hasil penelitian kepada berbagai lapisan masyarakat Bima dengan maksud, *pertama*, sebagai upaya untuk mengembalikan pengetahuan yang sudah diperoleh dari penelitian lapangan, mendiskusikan kembali temuan-temuan, dan mengkonfirmasi hasil bacaan mereka tentang masyarakatnya, dan *kedua*, untuk memperoleh komitmen sosial bagi langkah-langkah praksis pengembangan masyarakat.

“Pertemuan ini memberikan ide dan mengerucutkan fokus pengabdian pada isu perempuan dan perdamaian. Perdamaian dalam arti yang lebih luas baik pada tindakan preventif maupun penyediaan solusi. Juga menyentuh berbagai faktor yang merupakan akar dari munculnya konflik ekonomi, sosial, politik, dan agama. Upaya ini memang besar

dan kedegaran ambisius tetapi juga sebenarnya visioner.” (Wawancara Wardatun, Juli 2020)

Hal ini sejalan dengan pendapat beberapa aktivis akan perlunya “*Extending definition of peace and violence*,” definisi yang lebih terbuka tentang makna perdamaian dan kekerasan.

b. Periode Perencanaan

Setelah basis pemikiran dirasakan cukup memadai untuk membangun praksis dan gerakan perempuan untuk bina damai, maka direncanakan sebuah proyek skala kecil pengabdian masyarakat. Fokus isu pengabdian tersebut kemudian perlu dicari bentuk yang bisa diaplikasikan. Dalam proses mencari bentuk itu para pendiri menemukan *platform* isu gerakan pada lembaga AMAN (*Asian Muslim Action Network*) Indonesia. Lembaga ini telah banyak membentuk sekolah perempuan di berbagai tempat di Indonesia, terutama di wilayah konflik. Berdasarkan komunikasi dan diskusi yang intensif dengan pihak AMAN direncanakan sebuah pendampingan oleh AMAN bagi lembaga dan potensi lokal di Bima dalam rangka memperkuat pengetahuan untuk mencari bentuk bagi pemberdayaan perempuan untuk berperan dalam perdamaian.

Langkah awal diambil dalam bentuk kegiatan “Workshop Inisiasi Gerakan Pemberdayaan Perempuan untuk Perdamaian” pada 21 April 2018 di Kota Bima, diinisiasi dan difasilitasi bersama oleh Alamtara Institute dan AMAN Indonesia. Direktur AMAN, Ruby Kholifah, didampingi oleh managernya, Hanifah Haris, hadir langsung memberikan inspirasi dan berbagai wawasan dengan kelompok-kelompok strategis di Kabupaten Bima

dan Kota Bima. Acara itu membicarakan isu perempuan dan perdamaian.

Mendapatkan pengetahuan, pengalaman, dan model pemberdayaan, para peserta workshop berpikir tentang sumber daya dan konteks lokal yang bisa menjadi bahan untuk adaptasi model-model gerakan yang sudah ada sebelumnya dan di tempat lain. Kehadiran Bupati Bima dan beberapa lembaga terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bima dan Kabupaten Bima ikut memberi dorongan bagi kelompok strategis yang hadir untuk segera melahirkan gerakan yang nyata bagi pelibatan perempuan dalam bina damai. Workshop tersebut akhirnya menghasilkan beberapa keputusan penting, antara lain: identifikasi pihak-pihak yang bisa terlibat dan area yang menjadi *pioneer* bagi pembentukan sekolah perempuan.

Sekolah ini berfungsi sebagai forum perjumpaan bagi para perempuan untuk belajar bersama, *ngobrol santai*, dan *curhat*, sambil mencari solusi atas masalah bersama dan secara kreatif menghasilkan ide-ide dan karya pemberdayaan masyarakat dan penciptaan perdamaian. Sampai di sini nama La Rimpu sebenarnya belum terbentuk, masih menggunakan istilah Sekolah Perempuan (SP) sebagaimana yang digunakan oleh AMAN di daerah lain.

c. Periode Pembentukan

Pasca workshop, sebuah tim kecil yang difasilitasi oleh Alamtara Institute segera mendiskusikan rancangan utuh dan nama bagi sekolah perempuan yang hendak diinisiasi. Hasilnya berupa platform dan nama sekolah, yakni La Rimpu, singkatan dari Sekolah Rintisan

Perempuan untuk Perubahan. Nama ini dipilih karena dua alasan:

Pertama, diksi “*Rimpu*” diambil dari kata *rimpu*, yakni mode pakaian tradisional di kalangan perempuan Bima yang dikenakan sebagai semacam jilbab atau penutup kepala dan aurat. Pakaian ini terdiri dari dua lembar sarung yang dihasilkan dari proses tenun tradisional para perempuan Bima. Satu lembar dipakai sebagaimana layaknya sarung biasa dan lembar lainnya untuk penutup kepala dengan cara dililitkan dua kali di kepala dan diulurkan ke bawah sampai menutupi badan dan kedua belah tangan. *Rimpu* telah menjadi lambang identitas perempuan Bima. Sebagai identitas, *rimpu* terdiri dari dua jenis, yaitu *rimpu mpida* (hanya mata yang kelihatan) bagi perempuan yang belum menikah, dan *rimpu colo* (memperlihatkan seluruh bagian wajah) bagi perempuan yang sudah atau pernah menikah. “*La*” adalah penunjuk (*identifier*) yang berarti “*si*” sebagai awalan sebelum menyebut nama seseorang. Dari segi istilah, nama ini sangat kental dengan nuansa lokal dan memiliki nilai kultural yang penting bagi masyarakat Bima.

Kedua, nama *La Rimpu* mengirimkan pesan bahwa peran perempuan untuk perdamaian harus berangkat dari isu-isu lokal dan dengan teknik dan metode yang kontekstual serta relevan dengan kebutuhan spesifik masing-masing wilayah. Pola pemberdayaan perempuan yang berbasis pada sumberdaya lokal yang partikelir seperti yang direncanakan ini mempersyaratkan keterlibatan bersama-sama dengan anggota komunitas. Untuk alasan ini maka pada praktiknya *La Rimpu* tidak datang dengan modul yang baku dalam proses edukasi komunitas perempuan. Bahan dan strategi-teknik forum berlangsung fleksibel disesuaikan dengan kondisi dan

perkembangan subjek dan lokus selama proses pelatihan, pendampingan, dan monitoring.

Peluncuran La Rimpu dilakukan dengan dukungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN Mataram), pada 22 September 2018 di MA AL Jihad, Desa Ngali. Tempat peluncuran sengaja dipilih karena posisinya berada di area perbatasan antara Desa Renda dan Desa Ngali – dua desa yang selalu terlibat dalam konflik antarkampung. Hadir dalam acara ini Bupati Bima, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bima yang juga isteri Wakil Bupati Bima, anggota DPRD Kabupaten Bima yang berasal dari Desa Ngali, Kepala Desa Renda dan Kepala Desa Ngali, perwakilan dari Kantor Kecamatan Belo yang membawahi dua desa tersebut, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dari kedua desa. Pada 23 September 2018, sehari setelahnya, langsung diadakan kelas perdana La Rimpu dengan peserta sebanyak 30 orang, 15 dari Desa Renda dan 15 dari Desa Ngali.

“Pemilihan Desa Renda dan Desa Ngali sebagai tempat *pilot project* ini selain karena dua desa ini memiliki sejarah panjang konflik sosial juga karena kami bisa menjalin komunikasi dan kerja sama yang baik dengan perempuan-perempuan di dua desa tersebut. Para perempuan yang peduli bisa menerima kami untuk bersama-sama belajar dan menguatkan. Kami menghubungi tokoh perempuan kunci, Muslihah, SPd, yang juga berdarah Renda dari ayah dan Ngali dari ibu sebagai penyambung kami dengan masyarakat setempat. Lewat beliau yang juga kepala sekolah MTSN 1 Kabupaten Bima inilah kami dapat dengan mudah menjalin komunikasi dengan calon *pioneer* La Rimpu pada dua desa tersebut.” (Wawancara Marfuatun, Program Officer La Rimpu, Juli 2020).

Dalam kegiatan ini juga dirancang program-program yang dilakukan dan topik bulanan yang akan didiskusikan baik melalui *luring* maupun *daring* (melalui WA Group). Jadwal pendampingan sebanyak 12 kali pertemuan yang dilakukan bulan dengan anggota La Rimpu. Metode pembelajaran dilakukan dengan cara partisipatif dengan menggunakan pendekatan ABCD (*Asset-based Community Development*), misalnya dengan meminta anggota menggambar peta desa dan mengidentifikasi potensi maupun tantangan yang dimiliki oleh desa agar bisa mencari format pemberdayaan yang efektif dan efisien.

d. Periode Implementasi

Selama 2019, La Rimpu melakukan pendampingan terhadap tiga puluh perempuan dari dan di Desa Ngali dan Desa Renda. Untuk pendampingan ini La Rimpu mendapatkan bantuan dana dari pemerintah Kabupaten Bima karena dinilai sejalan dengan dan dapat turut mewujudkan visi Bima Ramah dalam kepemimpinan Bupati Indah Damayanti Putri - Dahlan M. Nor. Visi Bima "Ramah" sendiri adalah cita-cita dan program untuk mewujudkan masyarakat yang "Religius, Aman, Makmur, dan Handal" disingkat RAMAH.

Pada 2020, La Rimpu membuka lagi sekolah di dua titik konflik lain lagi di wilayah Kabupaten Bima yaitu Desa Kalampa dan Dadibou di Kecamatan Woha. Dua desa ini dipilih karena letaknya yang dekat dengan pusat pemerintahan kabupaten dan jalan provinsi. Konflik sosial sering terjadi antarkedua desa tersebut yang terkadang disertai dengan aksi kekerasan, pembakaran, serta penghadangan jalan yang mengganggu kelancaran transportasi dan stabilitas sosial. Tidak berhenti di dua titik

tersebut, dan terinspirasi oleh kemajuan pendampingan di dua titik sebelumnya, selanjutnya pada 2021, La Rimpu meluncurkan sekolah ini di titik konflik baru, yaitu di Desa Wora dan Nangawera di Kecamatan Wera Kabupaten Bima. Kedua desa ini sebelumnya satu desa yaitu desa Wora lalu dimekarkan menjadi dua desa. Sebagai dua desa yang awalnya satu kemudian terpisah, terdapat kompetisi keduanya yang dapat mengarah kepada konflik horizontal, juga sering terjadi konflik vertikal antara masyarakat dengan aparatur desa.

e. Periode Sosialisasi

Dalam usianya yang baru tiga tahun, La Rimpu menyadari pentingnya berada dalam jaringan pergaulan komunitas pemberdayaan dan gerakan yang lebih luas. La Rimpu sudah bersosialisasi dan membuka diri untuk kerjasama dengan berbagai pihak. seperti dengan *The Asian Muslim Action Network* (AMAN) Indonesia, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, The Habibie Centre (THC), UN Women, Komunitas Tanoker Ledokombo, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima, Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bima, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) NTB, KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Untuk Kesejahteraan), IPEMI (Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia) Kabupaten Bima, WYDII (Women and Youth Development Institute Indonesia), IMAH (Institute of Muslimah), Juwita (Jurnal Lima Wanita), dan tentu saja dengan lembaga induknya Alamtara Institute.

2. Gagasan, Aktor, Aksi, dan Strategi

Ketika La Rimpu diputuskan untuk dibentuk, yang paling awal dipikirkan adalah basis filosofis yang melandasi gerakan pendidikannya. Filosofi pendidikan ini selalu terselip dalam perbincangan setiap pertemuan dan menjadi wacana di kalangan pendiri dan pendukungnya. Mereka berbicara tentang pendidikan yang “memanusiakan manusia” sebagai landasan berpikir untuk praksis. Wacana yang masih terbatas di kalangan La Rimpu ini kemudian mereka temukan relevansinya dengan pemikiran humanisme Paulo Freire yang menggerakkan pendidikan emansipatoris yang membebaskan. Menurut Freire (2007), pendidikan mesti membebaskan manusia dari ketertindasan dan keterbelengguan dari apa pun terutama dari struktur yang meminggirkan. Pendidikan yang membebaskan dan memerdekakan dalam pengertian Freire berlangsung dalam suatu praksis pemberdayaan masyarakat tertindas agar mereka memiliki paradigma kritis untuk transformasi sosial. Dengan paradigma emansipatoris, pendidikan bukan semata-mata proses alih pengetahuan, melainkan juga proses mengetahui di mana pebelajar adalah subjek aktif yang mengalami dan merasakan persoalan dan ikut terlibat dalam dinamika kehidupan.

Filosofi tersebut memiliki aktualisasi yang tentu beragam antara tempat yang satu dengan yang lain. Dalam masyarakat Muslim seperti Bima, ajaran Islam dapat memberi bobot bagi aktualisasi pendidikan emansipatoris dan membebaskan itu, misalnya dengan penghayatan yang lebih baik terhadap ajaran Islam bahwa berbuat baik terhadap sesama manusia merupakan indikator utama bagi kualitas seseorang. Pada pelaksanaannya, aktor-aktor yang terlibat dalam pendidikan model ini, baik sebagai fasilitator maupun sebagai peserta didik, harus dipandang sebagai manusia yang memiliki potensi beragam dan didayagunakan sebagai sarana mempertajam nilai-nilai kemanusiaan. Semua subjek/aktor tanpa memandang jenis

kelamin berposisi setara karena memiliki kemanfaatan yang sama. Atas dasar pemikiran inilah maka strategi yang diterapkan oleh La Rimpu adalah memanfaatkan keunikan personal serta konteks sosial peserta agar bisa berperan secara aktif dan efektif di dalam upaya perdamaian.

Berdasarkan pemikiran di atas, La Rimpu mendorong keterlibatan aktif perempuan dalam transformasi sosial atas dasar asumsi dan kepercayaan bahwa pelibatan perempuan sebagai agen perdamaian bisa efektif, apalagi mereka dapat menginternalisasi kearifan lokal dalam gerak pemberdayaan mereka. Dalam halaman-halaman awal *Modul La Rimpu* (2020) dikatakan:

“Perempuan adalah kelompok masyarakat yang secara fitrah cinta terhadap kedamaian. Sayangnya, dalam banyak kasus mereka lebih diletakkan sebagai korban yang pasif. Padahal mereka senyatanya adalah subjek yang bisa berperan aktif untuk kontribusi yang positif. Pemanfaatan kearifan lokal menjadikan langkah bina damai itu sebagai sesuatu yang integral dengan kehidupan sehari-hari. Terjadi dan berfungsi secara alamiah. Dengan demikian, perempuan komunitas semakin percaya diri untuk terlibat menjadi pendamai tanpa mengubah jati diri.” (Wahid, Wardatun, Marfuatun, 2020: vi).

Internalisasi kearifan lokal di kalangan La Rimpu tergambar pada penemuan mereka atas filosofi gerakan dalam suatu rumusan yang bersumber pada ungkapan-ungkapan yang memuat nilai-nilai luhur Ke-Bimaan. Ungkapan-ungkapan ini kemudian dimaknai sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi sebagai sarana komunikasi maupun alat untuk memastikan aksi bina damai sekaligus transformasi sosial bisa berjalan efektif. Gagasan yang mencerminkan filosofi gerakan La Rimpu terangkum dalam 3M (*Mahawo, Manggawo, Marimpapa*).

Mahawo berarti mendinginkan, *Manggawo* berarti meneduhkan, sedangkan *Marimpa* dimaknai menginspirasi. Jargon 3M ini menjadi cita-cita sekaligus modal karakter yang harus tertanam pada diri aktor.

a. *Mahawo-Manggawo-Marimpa*: Gagasan dan Salam Damai La Rimpu

La Rimpu berdiri sebagai hasil rekomendasi dari pertemuan dua hari dari para penggagas yang diselenggarakan di Hotel Lambitu Kota Bima, 21 April 2018. Pertemuan yang difasilitasi oleh Alamtara Institute, Universitas Islam Negeri Mataram, dan Asian Muslim Action Networks (AMAN) mendapat sambutan dari kelompok strategis dalam masyarakat Bima, terutama kelompok perempuan, termasuk Bupati Bima sendiri. Kehadiran Bupati Bima, yang *notabene* perempuan pertama yang menjabat kepala daerah di NTB, memperkuat komitmen pertemuan itu untuk mempromosikan pelibatan perempuan di ranah publik. Dari pertemuan itu terakumulasi gagasan-gagasan dasar yang kemudian menjadi manifesto perjuangan La Rimpu. Gagasan-gagasan dasar tersebut tertuang dalam visi dan misi serta strategi perjuangan yang menjadi patokan dan arah perjuangan kaum perempuan dalam bina damai di Bima. Visi misi itu lalu dikemas dalam filosofi gerakan, yang merujuk kepada karakter pohon, yaitu *Mahawo*, *Manggawo* dan *Marimpa*. Filosofi ini merupakan persepsi diri sekaligus analisis sosial internal para aktor dalam melibati gerakan sosial di masyarakat sasaran. Pandangan dasar mereka adalah bahwa kaum perempuan memiliki kekuatan pada dimensi etik yang mampu memosisikan diri mereka pada gerak perubahan sosial.

Mahawo (yang mendinginkan) adalah identifikasi atas kapasitas dan kualitas diri di kalangan perempuan bahwa mereka memiliki kekuatan etos yang mendinginkan atau menyejukkan. Konflik yang biasanya dimulai dengan suasana 'panas' karena adanya saling ketidakpahaman di antara dua pihak yang bertikai perlu didinginkan. Peran perempuan di sini diterapkan secara minimal dengan tidak menjadi 'provokator' dari kedua pihak, dan secara maksimal sebagai agen yang justru mencari titik temu dan mengurai sumber kesalahpahaman tersebut.

Manggawo (yang meneduhkan) adalah kekuatan diri perempuan untuk mengayomi dalam jangkauan yang luas. Sejalan dengan peran penyejuk di atas, meneduhkan adalah peran lanjutan yang *linear*. Setelah para pihak yang bertikai menurunkan hawa 'panas' akibat kesalahpahaman, maka aktor perempuan masuk untuk bisa menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya kepada pihak yang bertikai maupun beberapa tokoh yang memiliki peran besar di dalam komunitas tersebut.

Marimpa (yang menginspirasi) adalah energi inspiratif yang bisa lahir dari kaum perempuan, karena kapasitas mengayomi dalam jangkauan yang luas tadi. Perempuan dengan multi identitas yang dimiliki diharapkan bisa menyebarkan keteladanan. Sebagai makhluk yang secara fisik diberikan 'rahim' yang berarti kasih sayang, dalam kapasitasnya sebagai ibu, istri, kakak, adik, maupun anak, perempuan bisa menjadi epicentrum keteladanan akan kecintaannya terhadap kedamaian dan nir kekerasan.

Gagasan 3M bukan sesuatu yang asing bagi perempuan di Bima karena merupakan nilai kearifan lokal yang sudah dipahami bersama. Oleh karena itu, pengenalan gagasan tidak mengalami banyak kendala. Yang diperlukan dalam pendampingan La Rimpu adalah

bagaimana gagasan ini dapat diwujudkan dalam praktik keseharian sehingga dapat dirasakan nilai *efficacy*-nya.

Dalam praktiknya, gagasan 3M menjadi *tagline* yang selalu dikumandangkan dalam pertemuan La Rimpu dan menjadi salam perdamiaan di manapun la Rimpu berakaivitas. Demikian pula jika ada sedikit gesekan internal di dalam diskusi dan pembuatan kesepakatan di dalam grup, maka salam perdamiaan inilah yang selalu diingatkan. Hal ini sangat efektif sebagai media introspeksi diri agar dalam setiap tindakan peserta La Rimpu selalu diwarnai dengan nilai *Mahawo, Manggawo, Marimpa*.

b. Perempuan Komunitas sebagai Aktor Perubahan

Pada level aktor, pelibatan perempuan internal komunitas sebagai tokoh utama gerakan merupakan salah satu cermin dari upaya mendorong perdamaian dari dalam (*from within*), bukan oleh orang luar (*outsider*). Para aktor dalam La Rimpu bukan terutama penggagas dan pelaku pertemuan sarasehan di awal pembentukan, tetapi justru utamanya aktor-aktor yang bergerak di akar rumput dari kaum perempuan dari desa sasaran. Secara praktis, aktor ini dibagi menjadi dua yaitu pengurus La Rimpu di level pusat dan pelaksana La Rimpu di level cabang. La Rimpu pusat dinamakan La Rimpu, sedangkan La Rimpu cabang dinamakan dengan nama tempat sasaran, seperti La Rimpu Renda-Ngali dan La Rimpu Kalampa-Dadibou, La Rimpu Wora-Nangawera.

Mereka yang menjadi aktor pada La Rimpu pusat adalah para anak muda dari berbagai latar belakang yang terdiri dari pengurus inti dan relawan yang disebut sebagai *soba* (sahabat) La Rimpu. Pengurus inti terdiri dari Pembina, Pengawas, Direktur, Program Officer,

dan Bendahara. Sedangkan relawan direkrut secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Kepada *Soba La Rimpu*, dilakukan penguatan kapasitas (*capacity building*) melalui forum *Shakaka* (*Sharing-Kaji-Karya*). *Shakaka* sendiri dalam bahasa Bima bermakna menghormati yang tua, menyayangi yang muda, menemani sesama, saling mengangkat nama, intinya saling meninggikan. Nilai *shakaka* ini juga merupakan etos lokal yang menggambarkan egalitarianisme para pelaku La Rimpu.

Aktor di tingkat akar rumput dianggap memiliki posisi strategis dan pengetahuan atau keterampilan yang bisa ditransfer kepada perempuan lain. Kebanyakan mereka adalah para sarjana atau kalangan terpelajar yang memiliki karakter organik, yakni punya jangkauan pengaruh pada komunitas. Isu penting dalam memilih aktor di komunitas adalah memilih *gatekeeper* yang tepat. Karena dua desa yang menjadi proyeksi projek ini adalah terlibat dalam konflik, perlu memilih aktor yang memiliki keterkaitan (*attachment*) dengan dua desa. Misalnya dalam La Rimpu Renda-Ngali, *gatekeeper*-nya adalah perempuan yang memiliki bapak dari Desa Renda dan ibu dari Desa Ngali. Demikian juga La Rimpu Kalampa-Dadibou, *gatekeeper* yang dipilih adalah perempuan asal Kalampa yang memiliki suami asal Dadibou. *Gatekeeper* inilah yang sekaligus berperan sebagai koordinator untuk memilih peserta serta sebagai penyambung lidah utama dengan La Rimpu pusat.

Para *Soba La Rimpu* memiliki dua lapisan peran, yaitu sebagai pelaku manajerial dan sebagai sukarelawan (*volunteers*). Yang pertama berperan sebagai komunikator dengan pihak luar secara vertikal, misalnya, dengan pemerintah daerah dan *stakeholders*, serta penyedia layanan informasi bagi *volunteers* dan kelompok sasaran. Sementara lapisan kedua berperan sebagai *mentor* bagi

kelompok sasaran dan komunikator ke dalam kelompok masyarakat. Peran-peran ini dimainkan secara egalitarian dalam hubungan dan komunikasi yang tidak bersifat hierarkis dalam pengertian baku.

Perekrutan para aktor dilakukan melalui sebuah proses yang relatif sederhana dalam pengertian efektif dan efisien, melalui proses 3K (komunikasi, komitmen, dan konsolidasi). Komunikasi adalah penyampaian dan penyebaran gagasan transformatif yang diperjuangkan La Rimpu melalui jejaring media sosial atau perjumpaan lain. Dalam komunikasi itu terkandung juga analisis sosial mengenai wilayah dan isu tertentu seperti isu konflik yang melibatkan perempuan di dalamnya. Dari situ diperoleh komitmen bersama dari peserta komunikasi untuk bergerak bersama melakukan tindakan sosial terencana. Setelah itu para aktor duduk bersama dalam suatu forum sarasehan atau workshop untuk melakukan analisis sosial lebih lanjut, mendalam, dan komprehensif untuk menentukan titik masuk (*entry point*), cara masuk, kelompok sasaran, serta kegiatan-kegiatan yang relevan dengan tujuan-tujuan perubahan yang ingin dicapai dalam kelompok sasaran.

c. *Shakaka* dan CEGAT: Aksi dua Arah La Rimpu

Aksi pendidikan dan pemberdayaan komunitas yang dilakukan oleh La Rimpu berorientasi pada penguatan aktor dan masyarakat dalam jangkaun jaringan aktor. Karena itu program-program aksi La Rimpu cenderung ke dalam. Hal ini dilakukan karena asumsi filosofis di awal bahwa perubahan sosial selalu dimulai dari perubahan pada tingkat individual diri aktor. Dari situ perubahan berdimensi sktruktural mengandaikan bekerjanya aktor dalam sebuah impelementasi kapasitas bertindak mereka

(*agency*) di ranah publik. Dalam konteks ini, La Rimpu menggerakkan program-program aksi sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Anggota

Posisi aktor sebagai katalisator perubahan mendapat perhatian tersendiri dari program aksi La Rimpu, mengingat dari sinilah perubahan komunitas digerakkan. Untuk relawan yang bergerak di level pusat, La Rimpu menggelar sebuah wadah bagi pengembangan kapasitas, diberi nama Shakaka (*Sharing-Kaji-Karya*). Kegiatan ini merupakan serangkaian dari tiga hal, yakni saling berbagai informasi dan pengetahuan di antara eksponen La Rimpu, terutama di tingkat pusat, kemudian mereka mengkaji lebih lanjut seperti membuat rancangan *assessment* dan mendiskusikannya, dan dari situ kepada mereka disertai amanat untuk menghasilkan karya-karya yang dapat mereka sumbangkan untuk komunitas perempuan di lokasi sasaran atau La Rimpu cabang. Forum Shakaka biasanya diselenggarakan secara rutin paling tidak per-triwulan di *basecamp* utama La Rimpu, yakni Kalikuma Library & EduCamp, Kota Bima. Kegiatan ini membangun komitmen bersama dan kapasitas terutama kompetensi metodologi, artikulasi, etik, serta wawasan-wawasan tentang pengembangan masyarakat (*community development*) dan kewirausahaan (*entrepreneurship*). Dari program ini mereka juga belajar jurnalistik dan metodologi penelitian yang praktis seperti etnografi dan *Partipatory Action Reseach* (PAR).

Sementara itu, untuk aktor di tingkat akar rumput, kegiatan pemberdayaan dilakukan di kelas yang dibuat di Uma La Rimpu sebanyak dua puluh

kali pertemuan dalam setahun. Uma (rumah) La Rimpu adalah rumah *basecamp* di mana para aktor, yakni perempuan di vocal point, berkumpul dan berdiskusi. Program ini berorientasi pada penguatan wawasan dan kapasitas bertindak, yang memuat empat topik inti yaitu: a) perempuan sebagai pelaku; b) menjadi orang tua millennial; c) perbedaan sebagai potensi; dan d) berpikir aktif, bertindak kreatif.

Di kelas, anggota La Rimpu tidak hanya mengisi pengetahuan tetapi juga merencanakan kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat. Untuk memandu program penguatan kapasitas ini telah diterbitkan sebuah modul berjudul *Modul La Rimpu*. Sebagaimana dikatakan sebelumnya, bahwa kehadiran modul ini hanya untuk memberi arahan untuk aspek-aspek pakem damai La Rimpu, selebihnya adalah garis-garis besar isu dan kurikulum yang bisa dijabarkan secara terperinci sesuai kondisi lapangan.

2. Usaha Pemberdayaan

La Rimpu juga memiliki beberapa usaha pemberdayaan berbasis masyarakat, disingkat CEGAT, karena meliputi *Care, Entrepreneurship, Green, Art, dan Tourism*. Diksi CEGAT yang bermakna melarang atau menghentikan sengaja ditampilkan untuk melekatkan semangat bina damai yang mengutamakan pencegahan secara dini. Istilah ini sejalan dengan misi La Rimpu yang ingin menghentikan konflik sosial antarkelompok masyarakat. Dari komitmen ini lahir apa program yang disebut *La Rimpu Care, La Rimpu Entrepreneurship, La Rimpu Green, La Rimpu Art, La Rimpu Tourism*.

Usaha pemberdayaan ini sebagian sudah berjalan, dan sebagian lain sedang dalam perencanaan untuk terapkan dalam *project* yang dinamakan *Uma Nggoli*. *Uma Nggoli* berarti rumah tenun. *Nggoli* adalah nama bagi tenunan khas Bima yang bercirikan warna-warna yang mencolok. Selain sebagai cabang usaha, CEGAT ini juga menjadi kegiatan extra-modul sehingga para peserta sekolah tidak melulu berbicara tentang perspektif dan teori, tetapi juga meningkatkan keterampilan dan kepedulian sesuai dengan kemampuan mereka sesuai tantangan yang dihadapi.

La Rimpu Care bisa terwujud karena *Uma Nggoli* ini adalah bentuk kepedulian *La Rimpu* untuk mendokumentasikan sejarah dan perkembangan *nggoli* dari awal, corak dan maknanya yang bervariasi dari tiap desa yang menghasilkan *nggoli*, serta data base perempuan penenun beserta hasil karyanya di kota dan kabupaten Bima.

La Rimpu Entrepreneurship direncanakan difasilitasi melalui *Uma Nggoli* karena bangunan ini akan menjadi pusat pemasaran bagi sarung tenun beserta produk diversifikasi kain tenun seperti tas, syal, sepatu, baju dll sehingga menjadi *muslim-ethnic fashion*. *Uma Nggoli* juga akan memfasilitasi alat-alat serta bahan untuk produksi tenunan yang berkualitas.

La Rimpu Green diproyeksikan oleh *Uma Nggoli* dalam upaya menggunakan pewarna alami bagi benang sebagai bahan dasar kain tenun serta bahan-bahan dan proses pengerjaan lainnya yang lebih *eco-friendly*. *La Rimpu green* juga terwujud dalam kegiatan gotong royong bersama, pengolahan sampah plastik jadi tas dan dompet, serta penanaman mangrove dan reboisasi.

La Rimpu Art dalam *Uma Nggoli* adalah dengan mendorong kreatifitas para perempuan untuk terus menghasilkan produk-produk yang bervariasi dari kain tenun sehingga kain tenun Bima bisa merambah kepada produksi segala macam fashion masyarakat agar betul-betul menjadi identitas dan mendorong semakin tingginya *supply and demand*.

La Rimpu Tourism dalam *Uma Nggoli* diarahkan agar bangunan ini menjadi museum bagi tersedianya informasi maupun hasil karya tenun dari masa ke masa yang bisa dinikmati oleh para wisatawan sehingga menjadi pusat pembelajaran masyarakat tentang hasil karya perempuan Bima yang bernilai tinggi ini. Museum *Uma Nggoli* ini diharapkan menjadi salah satu destinasi wisata edukasi bagi masyarakat maupun wisatawan.

3. Advokasi Sosial

Di samping kegiatan utama dan terencana sebagaimana di atas, *La Rimpu* juga melakukan kegiatan-kegiatan bersama dengan masyarakat sebagai perwujudan dari peran advokasi sosial. Kegiatan ini dilakukan terintegrasi dengan usaha pemberdayaan (CEGAT) tersebut di atas. Untuk *La Rimpu Care* misalnya berperan serta membantu korban kebakaran. Menyuarakan pentingnya keterlibatan perempuan dalam musyawarah desa dan berjuang agar keterwakilan perempuan pada BPD ada. *Hotline Sahabat Ibu* selama masa pandemi. Membuat kerajinan tangan dari sisa kain tenun berupa gantungan kunci, tas sehari-hari dan tas perempuan (*La Rimpu Entrepreneurship*). Melakukan pembersihan lingkungan bekerja sama dengan anggota kepolisian

dan pemerintah kecamatan dengan melibatkan semua guru dan siswa di sekolah yang ada di desa tempat La Rimpu (*La Rimpu Green*). Tampil menyerukan perdamaian lewat kesenian Qasidah pada MTQ tingkat desa maupun marawis (*La Rimpu Art*). Menjalin kerjasama dengan komunitas yang bergerak di bidang lingkungan hidup (*La Rimpu Green, La Rimpu Tourism, La Rimpu Care*).

d. Strategi Emansipatoris dengan Pendekatan Kearifan Lokal

Pada level strategi, nilai egalitarianisme yang berasal dari kearifan Bima *Shakaka* (saling menjunjung tinggi), menjadi metode pembelajaran sekaligus sebagai nama program pemberdayaan internal. Diksi ini kemudian dieksplorasi dalam kepanjangan dari “*Sharing-Kaji-Karya*.” Strategi ini mengandung nilai emansipatoris yang mengedepankan hubungan yang egalitarian antara aktor. Pada prosesnya terma *Shakaka* ini menjadi program regular La Rimpu untuk penguatan kapasitas relawan dan calon relawan dalam kompetensi metodologi, artikulasi dan etik. Strategi ini diterapkan dalam setiap level proses 3K, dan menghasilkan perubahan internal-individu yang pada gilirannya memicu perubahan kelompok di kalangan aktor maupun kelompok sasaran. Para aktor yang tadinya merasa berada di bagian pinggir proses sosial menjadi merasa sebagai subjek yang aktif dalam tindakan sosial.

Dalam cara kerja La Rimpu yang ditekankan adalah penguatan kapasitas kepemimpinan di kalangan perempuan untuk mengubah diri dan komunitas terdekat (keluarga dan lingkungan). Dengan demikian La Rimpu bergerak bukan sebagai

organisasi kader yang mementingkan banyaknya jumlah kelompok sasaran. La Rimpu menjadi semacam mesin yang menggerakkan kesadaran internal dan edukasi bagi kepemimpinan. Dengan itu, kemandirian menjadi hal yang penting dalam semua gerak La Rimpu. La Rimpu menjadi fasilitator saja dalam proses transformasi sosial dengan menginstalasi kesadaran partisipatoris-emansipatif pada kaum perempuan desa (Wawancara Marfuatun, Program Officer La Rimpu, Juli 2020).

Kesadaran partisipatoris-emansipatif ini mendorong pemahaman yang mendalam bahwa perubahan harus dimulai dan bergerak dari dalam komunitas itu sendiri. Strategi perubahan dari dalam dan oleh aktor perempuan ini ditanamkan agar para perempuan komunitas memiliki rasa percaya diri di dalam melakukan perubahan sosial, bahwa mereka adalah subjek pembangunan yang juga sama pentingnya dengan aktor-aktor dari luar. Penerapan strategi ini menyiratkan bahwa bina damai yang berangkat dari anggota komunitas sendiri serta dengan pendekatan non militeristik lebih efektif dan menjamin keberlangsungan perdamaian. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa La Rimpu menggunakan pendekatan kultural yang sangat kental dalam gerakannya.

Para peserta di tiga titik La Rimpu mengakui bahwa dengan mengikuti La Rimpu mereka merasa lebih percaya diri dan bisa berperan secara strategis di dalam penentuan arah kebijakan dan pembangunan desa terutama yang terkait dengan kepentingan perempuan. "Saya sendiri berkat la Rimpu dapat terpilih menjadi salah seorang anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Saya memperjuangkan program-program La Rimpu dalam pendanaan desa. Alhamdulillah sudah dua tahun ini kami mendapatkan support financial dari desa"

(Wawancara Sri, salah satu anggota La Rimpu, Agustus, 2021). Bukan hanya itu, mereka juga memiliki kesempatan untuk menyuarakan la Rimpu dalam kegiatan pada level kabupaten maupun provinsi. "Saya mewakili la Rimpu membuka stand pameran hasil karya-karya la Rimpu ke provinsi dan untuk pertama kalinya saya berfoto dengan ibu (istri gubernur) dan wakil gubernur perempuan." (Wawancara Hajrah, September 2021).

3. Refleksi Teoretik atas Praksis

Mencermati wacana dan praksis (proses) di balik pembentukan dan perjalanan La Rimpu terlihat adanya pergulatan dunia ide dalam praksis sosial. Gagasan-gagasan mengenai revitalisasi kearifan lokal berbaur menjadi satu dengan gagasan-gagasan progresif seperti emansipasi perempuan, aksiologi ilmu pengetahuan (ilmu bagi kehidupan), keterlibatan kaum intelektual publik, dan massifikasi otoritas publik. Pergulatan wacana dan praksis seperti ini sudah lama menjadi isu dalam ilmu sosial.

Wacana atau ide besar yang diusung oleh La Rimpu dan strategi yang diterapkannya mengingatkan pada konsep Ilmu Sosial Profetik (ISP) yang digagas oleh Kuntowijoyo (Raharjo:1998). Dalam ISP isu humanisasi, pembebasan, dan transendensi adalah isu sentral, yang mengandaikan bahwa transformasi atau perubahan sosial tidak bisa hanya dilakukan dengan pendekatan modernisasi dengan paradigma positivistik, melainkan juga diniscayakan adanya nilai-nilai transendensi yang menyertainya. Kerja ilmu-ilmu sosial melalui kaum terpelajar harus menjadikan nilai-nilai dan tauladan agama profetis sebagai perangkat untuk menggerakkan perubahan-perubahan dalam masyarakat, besar atau kecil (Rahardjo, 1998).

Dalam konteks kajian keislaman (*Islamic Studies*) terdapat paradigma MIT (Multidisipliner, Interdisipliner, dan Transdisipliner) ala Amin Abdullah (2021), bahwa puncak tertinggi dari dialektika pengetahuan dan kajian Islam terletak pada bagaimana mewujudkannya dalam kebermanfaatannya dan transformasi sosial. Gerak laju La Rimpu untuk sebagian lagi mendapatkan justifikasi dari paradigma ini.

Dengan paradigma yang diserap dari berbagai wacana membawa ilmu kepada kehidupan (*bringing knowledge to life*), La Rimpu bergerak dalam kerangka ilmu pengetahuan profetis. Bukan merupakan suatu kebetulan jika dalam berbagai penguatan kapasitas internal La Rimpu, jargon “bagi kita ilmu bukan sekedar pengetahuan atau penjelasan mengenai perubahan masyarakat, tetapi kita hendak mengubah masyarakat dengan penjelasan ilmu” selalu didengungkan.

Dalam memberi makna tentang perubahan sosial sebagaimana kata itu menjadi tema utama La Rimpu, pemikiran Mansour Fakih mengenai analisis gender menjadi acuan utama. Analisis gender yang diperkenalkan oleh Mansour Fakih pada era 1990-an akhir, bagi La Rimpu, memberi penguatan makna, konsepsi, asumsi, ideologi dan praktik, terutama dalam relasi antara kaum perempuan dan laki-laki serta implikasinya bagi proses sosial dan kebudayaan (Faqih, 2016). Dalam perspektif atau analisis gender, transformasi sosial adalah proses dekonstruksi peran gender dalam seluruh aspek kehidupan terutama pada dimensi kultural yang menyebabkan ketidakadilan dan diskriminasi.

Paradigma seperti di atas diadopsi oleh La Rimpu dalam berbagai tataran kemudian dikontekstualisasikan dalam gerakan pendidikan bagi masyarakat lokal dalam konteks bina damai. Para aktornya, terutama aktor intelektual, memahami cara kerja intelektual publik atau organik sebagaimana dikenalkan oleh Antonio Gramsci (Patria dan Arif: 2009). Intelektual organik yang dipahami oleh La Rimpu adalah mereka yang memiliki kapasitas

dan modal kultural berupa pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mereka menjadikan itu sebagai daya tawar untuk membentuk elite baru yang bisa mendorong masyarakat bergerak secara sukarela. Elit baru itu tidak lain dari komunitas yang tercerahkan, yang dalam pengandaian La Rimpu adalah kaum perempuan desa yang bergerak dalam medan budaya yang menyuburkan ekosistem bina damai.

Masyarakat di mana La Rimpu beroperasi jelas dapat dikategorikan sebagai masyarakat warga, yakni *locus* bagi konflik sosial, politik dan ekonomi di mana kompetisi dan perebutan kepentingan selalu menyertai. Dalam masyarakat yang pada dasarnya friksional, keselarasan dalam komunitas adalah sesuatu yang ideal (Imam, 2014). Seperti dipandu oleh asumsi Gramscian tersebut, La Rimpu menyadari pentingnya peran otoritas intelektual dalam komunitas di Ngali-Renda, Kalampa-Dadibou, serta Woro-Nangawera, yang berfungsi sebagai kekuatan moral dan intelektual yang menggerakkan masyarakat untuk menyetujui gagasan-gagasan mereka dan tindakan apa yang harus mereka lakukan secara sukarela.

Cara gerak yang dikonstruksi oleh kesadaran akademik di kalangan para aktor dalam La Rimpu itu memudahkan mereka untuk “menaklukkan” masyarakat sulit seperti beberapa masyarakat yang selalu bertikai di Bima itu. Cara kerja itu dibantu oleh kemampuan para aktor dalam menyerap cara kerja antropologi atau etnografi dalam gerak pendidikan komunitas ini. Adalah John Bowen (2012) yang menyuarakan pentingnya *new anthropology* dalam masyarakat Muslim. *New Anthropology* ini bekerja dengan memaksimalkan upaya mengungkap praktik (*practices*) yang dilakukan masyarakat Muslim dalam setiap aspek kehidupan, di antaranya kecenderungan membludaknya kajian terhadap dalil-dalil agama (*resources*). Praktik-praktik ini diuraikan demi menampakkan beragamnya cara masyarakat Muslim mengejewantahkan nilai-nilai agama yang berjalinkelindan dengan aspek sosial budaya mereka.

C. Simpulan

Pengalaman La Rimpu adalah eksemplar bagi pendokumentasian gagasan, strategi, peran, dan keberhasilan perempuan di dalam melakukan upaya bina damai pada level komunitas. Praktik La Rimpu seperti ini memberi kontribusi secara teoritis dan menopang data secara praktis terkait argumen pentingnya dan terjadinya partisipasi aktif perempuan sebagai aktor pada isu perdamaian. Konflik sosial yang kerap terjadi di Bima bisa terurai dengan upaya-upaya kultural tersebut di mana perempuan menjadi aktor utama di dalam transformasi masyarakat. Kearifan lokal sebagai basis utama mereka terejawantah baik pada tataran ide, aktor, aksi, dan strategi.

Pada tataran ide, La Rimpu menggunakan kearifan lokal yang dirangkai dalam konsep 3M (*Manggawo, Mahawo, Marimpa*) yang berarti mendinginkan, mendeduhkan, dan menginspirasi. Nilai ini terinternalisasi sedemikian rupa ke dalam diri perempuan-perempuan aktor perubahan sehingga mampu mengaktualisasikan nilai abstrak tersebut pada kehidupan sehari-hari baik dalam tindakan yang sederhana maupun dalam hubungan yang kompleks.

Pemilihan nama La Rimpu sendiri yang menggunakan bahasa lokal dan merupakan busana tradisional perempuan Bima membawa pesan betapa identitas yang bersumber dari kearifan lokal dapat menyimpan makna moralitas dan menumbuhkan rasa percaya diri. Demikian pula penamaan aktor La Rimpu sebagai *Soba* yang bermakna sahabat, yang dipilih secara sadar untuk menunjukkan nilai solidaritas sosial yang kuat dimiliki oleh masyarakat Bima. Moralitas saling menguatkan dan menjunjung juga tersirat dalam nama program *Shakaka* (*sharing-kaji-karya*) yang dalam bahasa lokal juga bermakna saling menghargai.

Pada level aktor, pemilihan pelaku dan inisiator perubahan dari dalam komunitas yang memiliki ikatan emosional yang

kuat dengan kelompok akar rumput atau masyarakat desa yang bertikai juga salah satu cara meyakinkan perempuan aktor perubahan bahwa mereka mampu menjadi pelaku bina damai yang lebih efektif daripada aktor-aktor luar. Dalam hal ini, mereka diberikan tanggungjawab dan 'posisi' terdepan sehingga aktor-aktor dari luar tidak membayangi peran aktif mereka.

Pada tataran aksi, La Rimpu menggerakkan aksi pemberdayaan yang berbasis pada penguatan kapasitas aktor dan relawan, yakni mereka yang menjadi aktor yang berperan sebagai katalisator dalam bina damai. Mobilitas modal kultural dari para aktor ini dilakukan dengan pembinaan internal yang meliputi kompetensi metodologis, artikulatif, dan etis. Sembari itu, aktor juga bekerja di dalam masyarakat dengan modalitas kompetensi itu untuk menggerakkan potensi dan sumberdaya desa setempat dari dalam (*from within*). La Rimpu mengimplementasikan program CEGAT (*care, entrepreneurship, green, art, dan tourism*) dalam rangka merangsang kreativitas perempuan desa. Aksi La Rimpu bukan penggalangan massa, tetapi pengembangan aktor bina damai sebagai kelompok kecil yang kreatif (*creative minority*).

Sementara pada aspek strategi, kearifan lokal *Shakaka* (saling mengangkat, menuntun, dan membesarkan nama) mengandung nilai egalitarianisme yang mendasari keseluruhan program maupun pendekatan yang dilakukan dalam tiga area aksi (pendampingan, usaha pemberdayaan, maupun pengabdian). Pendekatan partisipatif-emansipatoris yang bersumber dari kearifan lokal seperti ini dirasakan sangat efektif dalam melakukan kerja-kerja pemberdayaan dan transformasi sosial sehingga perubahan memang bersumber dari dalam: "dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri." Dengan demikian kemandirian masyarakat terutama perempuan menjadi cita-cita yang semakin mudah dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2020). *Multidisipliner, Interdisiplin, & Transdisiplin: Metode Studi Agama di Era Kontemporer*. Yogyakarta: IB Pustaka.
- Astuti, I. F. (2017). "Garduaction Sebagai Prototipe Bina Damai Berbasis Kearifan Lokal di Dusun Mancingan Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul Yogyakarta" dalam *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. 11 No 1. Halaman 89-108 <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/SosiologiAgama/article/view/1270>
- Bowen, J. R. (2012). *A New Anthropology of Islam*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dewi, M. A. (2013) "Membangun Perdamaian dari Perspektif Perempuan." Proseding Konferensi Nasional II Media Bisnis Perdamaian, Fisip UPN Veteran Yogyakarta 13 Desember. Halaman 290-307. <http://eprints.upnyk.ac.id/12575/1/Proceeding%20Konferensi%20BISNIS%20MEDIA%20dan%20PERDAMAIAN.pdf#page=302>
- Farida, U. (2018). "Peran Organisasi Massa Perempuan dalam Pembangunan Perdamaian : Studi Kasus Muslimat NU Jawa Tengah)," dalam *Palastren*. Vol. 11 No. 1. Halaman 51-72. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/3092>
- Faqih, M. (2015). *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: INSIST Press cetakan Ke-15.
- Fitriani. (2018). "Membangun Bina Damai melalui Sistem Kekebabatan (Dalihan na Tolu dan rakut Sitelu di Kabanjahe Kabupaten Tanah Karo)," dalam *Studia Sosia-religia*. Vol. 1 No. 2. Halaman 40-49.

- Freire, P. (2007). *Politik pendidikan: Kebudayaan, kekuasaan, dan pembebasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Imam, R. H. (2014). "Masyarakat Warga dalam Pemikiran Antonio Gramsci, dalam F. Budi Hardiman (ed.), *Ruang Publik: Melacak Partisipasi Demokratik dari Polis sampai Cyberspace*. Yogyakarta: Kanisius.
- Indriani, J. A., Dian, K. (2018). "Pendidikan Perdamaian Untuk Perempuan: Studi Kasus Sekolah Perempuan Untuk Perdamaian Jakarta." Tesis S2 Ketahanan Nasional UGM Yogyakarta <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/154909>
- Ismiati. (2016). "Eksistensi Aktivistis Perempuan dalam Mewujudkan Perdamaian," dalam *Jurnal al Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Dakwah*. Vol.22 No. Halaman 1-18. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/bayan/article/view/643>
- Jati, W. R. (2013). "Kearifan Lokal sebagai Resolusi Konflik Keagamaan," dalam *Walisongo Jurnal Penelitian Islam Keagamaan*. Vol.21 No. 2. Halaman 394-416. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/article/view/251>
- Mulia, M. (2018). "Perempuan dalam Gerakan Terorisme di Indonesia," dalam *Al-Wardah*. Vol.12 No.1. Halaman 80-95. <http://journal.iain-ternate.ac.id/index.php/alwardah/article/view/136>
- Nasrullah, A. (2018). "A Combination of Cultural Wisdom and Religious Values in "Bina Damai" (Build Peace) in Gunungsari District, Lombok, Indonesia," dalam *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*. Vol. 1 No. 2. Halaman 178-192. <https://alhayat.or.id/index.php/alhayat/article/view/30>

- Ocktaviana, S. W., Santoso, M., Purwoko, D. (2014). "Peran-peran Perempuan di Wilayah Konflik: Antara Korban, Penyintas, dan Agen Perdamaian," dalam *Jurnal Masyarakat dan Budaya*. Vol. 16 No. 3. Halaman 383-398. <https://jmb.lipi.go.id/jmb/article/view/40>
- Patria, N dan Andi Arief. (2009). *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pattisiana, SMO., Izak Y. M. L., Timo, E. I. N. (2018). "Perempuan dan Liminalitas Perdamaian: Hubungan Islam Kristen dalam Liminalitas Simbolik Kain Gandong di Maluku," dalam *Palastren*. Vol. 11 No.2. Halaman 205-232. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/3298>
- Rahardjo, M. D. (1998). "Ilmu Sejarah Profetis dan Analisis Transformasi Masyarakat," dalam Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan.
- Rihartono, S. (2013). "Memposisikan Kembali Kuasa Perempuan dalam Perdamaian Hubungan Antaragama: Kasus di Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta," dalam *Jurnal Komunikasi Profetik*. Vol.6No.2. Halaman 49-62. (<http://202.0.92.5/isoshum/profetik/article/viewFile/1169/1079>)
- Wahid, A. (2016). "Praktik Budaya Raju dalam Pluralitas *Dou Mbawa* di Bima Nusa Tenggara Barat," Disertasi. Bali: Universitas Udayana.
- (2019). "Do'a Kasaro and It's Cultural Codes in Muslim Society of Bima, Eastern Indonesia," dalam *Ulumuna Journal of Islamic Studies*. Vol.3 No. 2. Halaman 361-383.<https://ulumuna.or.id/index.php/ujs/article/view/376>.

- Wahid, A., Wardatun, A., Marfuatun, L. (2020). *Modul La Rimpu*. Mataram: Alamtara Institute.
- Wahyu, R., S. P., Maulida, N. (2019). "Srikandi Lintas Iman: Praktik Gerakan Perempuan dalam Menyuarakan Perdamaian di Yogyakarta," dalam *Jurnal Sosiologi Reflektif*. Vol.13 No. 2. Halaman 49-62 <http://ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/sosiologireflektif/article/view/1607>
- Wardatun, A. (2017). "Marriage Payment, Social Change, and Women's Agency among Bimanese Muslims in Eastern Indonesia" Unpublished dissertation (Sydney: Western Sydney University)
- , 2019. "Matrifocality and Collective Solidarity in Practicing Agency: Marriage Negotiation Among The Bimanese Muslim Women in Eastern Indonesia," dalam *Journal of International Women's Studies*. Vol. 20.No. 2. Halaman 43-57. <https://vc.bridgew.edu/jiws/vol20/iss2/4/>
- Yustisia, I. R. (2016). "Potensi dan Peran Perempuan dalam Gerakan Perdamaian," dalam *Jurnal Annual Malang International Peace Conference*. Vol.2No.2 (2016) <http://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/amipec/article/view/29>

